



Kembali Sepi, PHRI Minta Relaksasi Perizinan

PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran (PHRI) DIJ kembali galau pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Pelaku usaha jasa pariwisata terdampak secara langsung penerapan kebijakan tersebut. PHRI DIJ pun meminta relaksasi perizinan agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi.
 Ketua BPD PHRI DIJ, Dedy Pranowo

Eryono mengatakan, kapasitas kamar hotel yang boleh dioperasikan hanya 50 persen dari sebelumnya 70 persen saat PPKM Level 2. Hal tersebut berdampak pada operasional hotel dan restoran selama masa pandemi. "Kemarin sudah mulai bangkit, sekarang kami galau. Harus ada kewajiban yang kami penuhi seperti perpanjangan izin," katanya kemarin (9/2) ▸ [Baca Kembali... Hal 3](#)



Kita minta kebijakan pemerintah untuk memperpanjang SLF tanpa ada biaya. Izin-izin yang menimbulkan biaya cukup besar mohon ada kebijakan untuk membebaskan dulu."

DEDDY PRANOWO ERYONO
 Ketua BPD PHRI DIJ

Kembali Sepi, PHRI Minta Relaksasi Perizinan

Sambungan dari hal 1

Salah satu yang paling membutuhkan dana tidak sedikit ialah mengurus perpanjangan izin sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan. Sejauh ini legalitas bangunan yang dipunyai itu sudah habis masa berlakunya dan harus diperpanjang. Namun, masih belum cukup finansial ditambah terkena dampak lagi aturan PPKM level 3.

"Kita minta kebijakan pemerintah untuk memperpanjang SLF tanpa ada biaya. Izin-izin yang menimbulkan biaya cukup besar mohon ada kebijakan untuk membebaskan dulu," ujarnya.

Disebutkan, biaya perpanjangan SLF berkisar antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 50 juta. Besaran biaya ini tergantung dari luas hotel dan jumlah kamar hotel. "Banyak biayanya, apalagi kami baru sulit keadaannya," keluhnya. Selain itu, PHRI juga memin-

ta pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kapasitas kamar 50 persen yang bisa dioperasikan beserta aturan PPKM yang mengikuti akan berdampak terhadap pendapatan yang masuk. Terlebih, belum lama ini baru saja melunasi PBB sekitar Desember 2021 lalu. Praktis, sekarang ini masih belum cukup finansial ditambah aturan level 3 yang belum dapat dipastikan tenggat waktunya. "Kemarin uang kami habis untuk membayar PBB dan untuk mengembalikan utang. Sekarang kena lagi (aturan)," terangnya. Adapun, okupansi hotel saat ini hanya sekitar 20-30 persen dari semula 70 persen pada hari-hari *weekdays*. Sedangkan untuk akhir pekan yang biasanya bisa mencapai 90 persen. Kini tinggal 30-40 persen. "Reservasi banyak yang menunda karena ada Omicron," tambahnya.

Seiring peningkatan kasus probable Omicron di Jogja, PHRI juga berupaya memperketat aturan prokes di hotel dan restoran. Pengunjung atau tamu tanpa memakai masker dilarang masuk hotel dan restoran. Saat ini kapasitas kamar yang dipakai hanya 50 persen atau separuhnya dari jumlah kamar.

Terpisah, Wali Kota Jogja, Harjadi Suyuti mengatakan, jika ada yang keberatan dengan pembayaran pajak, akan diupayakan dibantu. Tetapi, harus secara formal mengajukan permohonan keringanan pengurangan atau penundaan pembayaran pajak.

"Kalau mau mengajukan ya ajukan secara resmi, formal. Bisa penundaan atau pengurangan (pembayaran pajak). Tapi yang jelas tidak boleh pembebasan pajak, orang bayar pajaku tidak boleh terus tidak bayar pajak," katanya. (**wia/bah/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005